

LAMPIRAN

LAMPIRAN 1. SURAT KETERANGAN PENELITIAN



KEMENTERIAN PERTAHANAN RI
UNIVERSITAS PERTAHANAN

Nomor : B/2349 / X / 2017
Klasifikasi : Biasa
Lampiran : -
Hal : Permohonan izin penelitian dan
permintaan data

Bogor, 31 Oktober 2017

Kepada
Yth. Direktur HAM dan Kemanusiaan
Ditjen Kerjasama Multilateral
Kemenlu

di
Jakarta

1. Dasar:
 - a. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2011 tentang Universitas Pertahanan sebagai Perguruan Tinggi yang Diselenggarakan Oleh Pemerintah.
 - b. Kalendar Akademik Program Studi Diplomasi Pertahanan Fakultas Strategi Pertahanan Universitas Pertahanan TA. 2016/2017.
2. Sehubungan dasar di atas, dengan hormat disampaikan bahwa:
 - a. Sebagai persyaratan kelulusan Program Pascasarjana Universitas Pertahanan, bagi mahasiswa diwajibkan menyusun tesis yang terkait dengan bidang program studinya.
 - b. Mahasiswa Program Studi Diplomasi Pertahanan Fakultas Strategi Pertahanan Unhan atas nama Yelika Pattipawaey NIM: 120160106034, bermaksud menyusun tesis dengan judul: Strategi Indonesia Dalam Diplomasi Pertahanan Untuk Menghadapi Desakan Internasional Terkait Isu Lesbian Gay Biseksual dan *Transgender* (LGBT).
3. Berkenaan dengan hal tersebut mohon mahasiswa dimaksud diizinkan untuk melaksanakan penelitian dalam rangka mendapatkan data dan keterangan termasuk melakukan wawancara.
4. Konfirmasi lebih lanjut dapat menghubungi Yelika Pattipawaey, NIM: 120160106034, nomor HP. +6281332946194, e-mail : yelika.pattipawaey@idu.ac.id
5. Demikian mohon menjadi periksa.

a.n. Rektor
Universitas Pertahanan
Warek I Bid. Akademik dan Kemahasiswaan,

Prof. Dr. Ir. Dadang Gunawan, M. Eng
Pembina Utama IV/e

Tembusan:

1. Rektor Unhan
2. Kasatwas Unhan
3. Dekan FSP Unhan
4. Karo Aka. dan Kemahasiswaan Unhan
5. Ses Prodi Diplomasi Pertahanan FSP Unhan



KEMENTERIAN PERTAHANAN RI
UNIVERSITAS PERTAHANAN

Nomor : B/2349 / X / 2017

Bogor, 03 Oktober 2017

Klasifikasi : Biasa

Lampiran : -

Hal : Permohonan izin penelitian dan
permintaan data

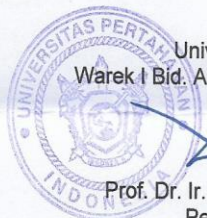
Kepada

Yth. Dirjen Hak Asasi Manusia
Kemendikham

di

Jakarta

1. Dasar:
 - a. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2011 tentang Universitas Pertahanan sebagai Perguruan Tinggi yang Diselenggarakan Oleh Pemerintah.
 - b. Kalender Akademik Program Studi Diplomasi Pertahanan Fakultas Strategi Pertahanan Universitas Pertahanan TA. 2016/2017.
2. Sehubungan dasar di atas, dengan hormat disampaikan bahwa:
 - a. Sebagai persyaratan kelulusan Program Pascasarjana Universitas Pertahanan, bagi mahasiswa diwajibkan menyusun tesis yang terkait dengan bidang program studinya.
 - b. Mahasiswa Program Studi Diplomasi Pertahanan Fakultas Strategi Pertahanan Unhan atas nama Yelika Pattipawaey NIM: 120160106034, bermaksud menyusun tesis dengan judul: Strategi Indonesia Dalam Diplomasi Pertahanan Untuk Menghadapi Desakan Internasional Terkait Isu Lesbian Gay Biseksual dan *Transgender* (LGBT).
3. Berkenaan dengan hal tersebut mohon mahasiswa dimaksud diizinkan untuk melaksanakan penelitian dalam rangka mendapatkan data dan keterangan termasuk melakukan wawancara.
4. Konfirmasi lebih lanjut dapat menghubungi Yelika Pattipawaey NIM: 120160106034, nomor HP. +6281332946194, e-mail : yelika.pattipawaey@idu.ac.id
5. Demikian mohon menjadi periksa.



a.n. Rektor
Universitas Pertahanan
Warek I Bid. Akademik dan Kemahasiswaan,

Prof. Dr. Ir. Dadang Gunawan, M. Eng
Pembina Utama IV/e

Tembusan:

1. Rektor Unhan
2. Kasatwas Unhan
3. Dekan FSP Unhan
4. Karo Aka. dan Kemahasiswaan Unhan
5. Ses Prodi Diplomasi Pertahanan FSP Unhan.



KEMENTERIAN PERTAHANAN RI
UNIVERSITAS PERTAHANAN

Nomor : B/2349 IX/2017

Bogor, 31 Oktober 2017

Klasifikasi : Biasa

Lampiran : -

Hal : Permohonan izin penelitian dan
permintaan data

Kepada

Yth. Direktur Bela Negara Ditjen
Potan Kemhan

di

Jakarta

1. Dasar:
 - a. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2011 tentang Universitas Pertahanan sebagai Perguruan Tinggi yang Diselenggarakan Oleh Pemerintah.
 - b. Kalender Akademik Program Studi Diplomasi Pertahanan Fakultas Strategi Pertahanan Universitas Pertahanan TA. 2016/2017.
2. Sehubungan dasar di atas, dengan hormat disampaikan bahwa:
 - a. Sebagai persyaratan kelulusan Program Pascasarjana Universitas Pertahanan, bagi mahasiswa diwajibkan menyusun tesis yang terkait dengan bidang program studinya.
 - b. Mahasiswa Program Studi Diplomasi Pertahanan Fakultas Strategi Pertahanan Unhan atas nama Yelika Pattipawaey NIM: 120160106034, bermaksud menyusun tesis dengan judul: Strategi Indonesia Dalam Diplomasi Pertahanan Untuk Menghadapi Desakan Internasional Terkait Isu Lesbian Gay Biseksual dan *Transgender* (LGBT).
3. Berkenaan dengan hal tersebut mohon mahasiswa dimaksud diizinkan untuk melaksanakan penelitian dalam rangka mendapatkan data dan keterangan termasuk melakukan wawancara.
4. Konfirmasi lebih lanjut dapat menghubungi Yelika Pattipawaey, NIM: 120160106034, nomor HP. +6281332946194, e-mail : yelika.pattipawaey@idu.ac.id
5. Demikian mohon menjadi periksa.

a.n. Rektor
Universitas Pertahanan
Warek I Bid. Akademik dan Kemahasiswaan,

Prof. Dr. Ir. Dadang Gunawan, M. Eng
Pembina Utama IV/e

Tembusan:

1. Rektor Unhan
2. Dirjen Potan Kemhan
3. Kasatwas Unhan
4. Dekan FSP Unhan
5. Karo Aka. dan Kemahasiswaan Unhan
6. Ses Prodi Diplomasi Pertahanan FSP Unhan.



KEMENTERIAN PERTAHANAN RI
UNIVERSITAS PERTAHANAN

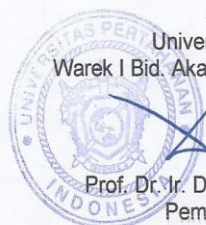
Nomor : B/234 / IX / 2017
 Klasifikasi : Biasa
 Lampiran : -
 Hal : Permohonan izin penelitian dan permintaan data

Bogor, 22 September 2017

Kepada
 Yth. Perwakilan AICHR di Indonesia
 di
 Jakarta

1. Dasar:
 - a. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2011 tentang Universitas Pertahanan sebagai Perguruan Tinggi yang Diselenggarakan Oleh Pemerintah.
 - b. Kalender Akademik Program Studi Diplomasi Pertahanan Fakultas Strategi Pertahanan Universitas Pertahanan TA. 2016/2017.
2. Sehubungan dasar di atas, dengan hormat disampaikan bahwa:
 - a. Sebagai persyaratan kelulusan Program Pascasarjana Universitas Pertahanan, bagi mahasiswa diwajibkan menyusun tesis yang terkait dengan bidang program studinya.
 - b. Mahasiswa Program Studi Diplomasi Pertahanan Fakultas Strategi Pertahanan Unhan atas nama Yelika Pattipawaey NIM: 120160106034, bermaksud menyusun tesis dengan judul: Strategi Indonesia Dalam Diplomasi Pertahanan Untuk Menghadapi Desakan Internasional Terkait Isu Lesbian Gay Biseksual dan *Transgender* (LGBT).
3. Berkenaan dengan hal tersebut mohon mahasiswa dimaksud diizinkan untuk melaksanakan penelitian dalam rangka mendapatkan data dan keterangan termasuk melakukan wawancara.
4. Konfirmasi lebih lanjut dapat menghubungi Yelika Pattipawaey NIM: 120160106034, nomor HP. +6281332946194, e-mail : yelika.pattipawaey@idu.ac.id
5. Demikian mohon menjadi periksa.

a.n. Rektor
 Universitas Pertahanan
 Wark I Bid. Akademik dan Kemahasiswaan,



[Signature]
 Prof. Dr. Ir. Dadang Gunawan, M. Eng
 Pembina Utama IV/e

Tembusan:

1. Rektor Unhan
2. Kasatwas Unhan
3. Dekan FSP Unhan
4. Karo Aka. dan Kemahasiswaan Unhan
5. Ses Prodi Diplomasi Pertahanan FSP Unhan.

LAMPIRAN 2: PANDUAN WAWANCARA

NO	PERTANYAAN PENELITIAN	ASPEK PENTING	PERTANYAAN TURUNAN
1	Bagaimana upaya Pemerintah Indonesia untuk memperkuat sistem pertahanan negara dalam menghadapi tekanan masyarakat internasional terkait legalisasi LGBT khususnya menyangkut perkawinan sejenis	Kaum LGBT	<p>Bagaimana pandangan..... terhadap keberadaan kaum LGBT di Indonesia dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara</p> <p>Bagaimana pandangan terkait anggapan kaum LGBT di Indonesia yang merasa diri sebagai kaum yang mengalami diskriminasi dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara</p> <p>Sejak terbentuknya organisasi <i>gay</i> pertama di Jakarta pada tahun 1982 telah terdapat 2 jaringan kerja nasional dengan 119 organisasi LGBT yang terbentuk di 28 propinsi di Indonesia. Kenyataan ini mengindikasikan peningkatan jumlah orang yang mengidentifikasi dirinya sebagai LGBT. Bagaimana pandangan terhadap kondisi ini? Apakah berarti keberadaan kaum LGBT diakui secara sah oleh negara?</p> <p>Beberapa daerah di Indonesia mengeluarkan Perda yang secara jelas melarang keberadaan kaum LGBT dengan segala aktifitasnya. Selain itu, terdapat pengertian-pengertian yang berbeda dalam setiap Perda terkait LGBT. Perda-perda ini kemudian dianggap sebagai salah satu bentuk diskriminasi oleh kaum LGBT. Bagaimana pandangan terhadap kenyataan ini?</p> <p>Bagaimana pendapat (pribadi) mengenai kaum LGBT itu sendiri?</p>
		Legalisasi	Bagaimana pandangan terkait tuntutan legalisasi perkawinan sejenis di Indonesia yang diajukan atas dasar HAM. Apakah akan

			<p>memberi dampak pada stabilitas pertahanan dan keamanan negara mengingat UU Perkawinan yang berlaku di Indonesia tidak mengakui perkawinan sejenis ?</p> <p>Apakah negara-negara yang sudah melakukan tindakan legalisasi LGBT terkait perkawinan sejenis dapat memberi pengaruh bagi pergerakan kaum LGBT di Indonesia? Apakah ini berarti Indonesia dan negara-negara tersebut memiliki cara pandang yang berbeda terkait pemajuan dan perlindungan hukum dan nilai-nilai HAM?</p>
		Tekanan Internasional	<p>Bagaimana pandangan terkait pengajuan permohonan nikah sesama jenis yang terjadi di Indonesia. Apakah ini berarti masyarakat khususnya kaum LGBT di Indonesia belum memiliki pemahaman akan mekanisme hukum di Indonesia? ataukah karena adanya pengaruh dari luar khususnya dari negara-negara yang sudah melegalkan?</p> <p>Bagaimana pandangan terkait tekanan masyarakat internasional yang dilakukan terhadap Pemerintah Indonesia untuk ikut melegalkan perkawinan sejenis? Tekanan yang dimaksud berupa rekomendasi yang dihasilkan dalam beberapa pertemuan HAM internasional seperti pertemuan Yogyakarta dan program being LGBT in Asia yang dilaksanakan di Bali. Selain itu tekanan juga berupa pernyataan tokoh-tokoh publik internasional yang ditujukan langsung kepada Pemerintah Indonesia?</p>
		Upaya Pemerintah	<p>Bagaimana pandangan terkait upaya Pemerintah Indonesia dalam menghadapi tekanan masyarakat internasional terkait legalisasi LGBT khususnya menyangkut perkawinan sejenis dalam bingkai pemajuan dan perlindungan HAM</p>

2	Bagaimana upaya diplomasi pertahanan Pemerintah Indonesia melalui AICHR untuk menghadapi masyarakat internasional yang memberikan tekanan terkait legalisasi LGBT khususnya menyangkut perkawinan sejenis?	Diplomasi Pertahanan	Bagaimana upaya diplomasi Pemerintah Indonesia dalam menghadapi masyarakat internasional yang memberikan tekanan terkait legalisasi LGBT khususnya menyangkut perkawinan sejenis dalam bingkai pemajuan dan perlindungan HAM?
			Bagaimana strategi Pemerintah Indonesia untuk mendukung upaya diplomasi yang dilakukan mengingat tekanan masyarakat internasional terkait legalisasi perkawinan sejenis bersinggungan dengan kepentingan nasional Indonesia pada aspek ideologi. Dengan demikian upaya yang dilakukan adalah untuk melindungi Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara. Nilai-nilai Pancasila menjiwai semua hukum dan undang-undang yang berlaku di Indonesia termasuk didalamnya undang-undang tentang perkawinan
		Koordinasi Antar Kementerian	Apakah dibutuhkan koordinasi antar kementerian untuk mendukung upaya diplomasi yang dilakukan dalam menghadapi masyarakat internasional yang memberikan tekanan kepada Pemerintah Indonesia terkait legalisasi LGBT khususnya menyangkut perkawinan sejenis.
		AICHR	Bagaimana peran AICHR sebagai komisi HAM antar Pemerintah negara-negara ASEAN dalam menghadapi isu pemajuan dan perlindungan HAM yang dikaitkan dengan legalisasi LGBT khususnya menyangkut perkawinan sejenis?

LAMPIRAN 3: DOKUMEN PENDUKUNG

Wawancara dengan dengan Tristan Sumarjon,
Direktur Komponen Pendukung, Direktorat Jenderal Potensi Pertahanan,
Kementerian Pertahanan RI



Wawancara dengan Dino Anggoro, Fungsional Diplomat,
Direktorat HAM dan Kemanusiaan, Direktorat Kerja Sama Multilateral,
Kementerian Luar Negeri RI